



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori – teori yang menjadi landasan dalam penelitian yang dilakukan. Dimana teori – teori yang digunakan ini diperoleh dari penelitian – penelitian yang sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variable yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep – konsep atau teori – teori atau penelitian terdahulu berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran tersebut terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi atau *Agency Theory*

Menurut Jensen & Meckling (1976) definisi dari teori agensi atau *agency theory* :

“*Agency relationship as contact under which one or more persons (the principal (s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating making authority to the agent.*”

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara pihak *Principal* membayar pihak *Agent* untuk melakukan suatu jasa serta mendelegasikan wewenang atau otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan pihak *agent* merupakan hubungan *employee* kontrak, dimana *agent* bertanggung jawab melaporkan kinerja kepada *principal*.

Di dalam perusahaan hubungan agensi ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan pihak *agent*. *Agent* memiliki tujuan untuk



mendapatkan insentif yang sebesar – besarnya atas hasil kerja yang telah dicapai oleh *agent*.

Sedangkan pihak *principal* memiliki keinginan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan cara memperoleh *return* dan pengembalian yang tinggi atas investasinya.

Eisenhardt (1989) menjelaskan tiga asumsi terkait teori keagenan (*agency theory*) adalah sebagai berikut :

- a. *People* (manusia), dimana manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), daya pikir manusia yang terbatas mengenai persepsi masa depan (*bounded rationality*) dan manusia selalu enggan dalam mengambil resiko (*risk averse*)
- b. *Organization* (organisasi), dimana organisasi merupakan sebuah wadah ketidakselarasan tujuan yang dapat terjadi diantara anggota dan efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara pihak *principal* dan pihak *agent*.
- c. *Information* (informasi), dimana informasi merupakan asumsi suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Dalam teori agensi yang dimaksud pihak *agent* adalah manajemen, sedangkan yang dimaksud pihak *principal* adalah pemegang saham. Kedua pihak tentu memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari masing- masing pihak. Pihak *principal*, yaitu: pemegang saham ingin mendapatkan return atau tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi mereka, sedangkan pihak *agent*, yaitu: manajer tentu ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi berupa insentif. Laba yang tinggi menjadi dasar bagi kedua pihak karena dengan laba yang tinggi maka pemegang saham akan mendapatkan dividen yang tinggi, sedangkan bagi manajer perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi maka dapat menunjukkan kinerja manajer perusahaan sudah baik sehingga mereka mengharapkan insentif atau bonus atas hasil kerjanya. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik



kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik antara pihak *principal* dan pihak *agent* terjadi karena adanya kemungkinan pihak *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pihak *principal*, karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan pihak *agent* sehingga muncul yang namanya *agency problem*. *Agency Problem* ini menghasilkan biaya agensi atau *agency cost*.

Menurut Jensen & Meckling (1976) Biaya keagenan atau *agency cost* terdiri dari biaya *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss* :

- a. **Monitoring Cost** adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi perilaku *agent*, membatasi perilaku menyimpang dari *agent*.
- b. **Bonding Cost** adalah biaya yang dikeluarkan untuk membantu mekanisme yang menjamin *agent* akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*
- c. **Residual Loss** adalah biaya yang terkait berkurangnya kesejahteraan *principal* akibat konflik dalam hubungan *agency*.

2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Salah satu teori yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah *stakeholder theory*. Ghozali & Chariri (2007) menjelaskan perusahaan harus menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan keinginan dan kebutuhan yang ada, terutama pemangku kepentingan yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan dan pemilik. *Stakeholder Theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya (*stakeholder*).



Kelangsungan hidup suatu perusahaan bergantung pada para pemangku kepentingan.

Dengan adanya pengungkapan *sustainability report* diharapkan dapat memenuhi keinginan para pemangku kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Menurut Ullman (1985) dalam Ghozali & Chariri (2007) terdapat beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk manage *stakeholder* tergantung pada strategi yang diadopsi oleh perusahaan, yaitu: *active posture* dan *passive posture*. Perusahaan dengan *active posture* tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder* tetapi juga menentukan *stakeholder* mana yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi sumber ekonomi ke perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan *passive posture* cenderung tidak terus menerus memonitor aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholder*. Kurangnya perhatian terhadap *stakeholder* dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan.

Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

3. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Hal yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali & Chariri, 2007). Dalam teori legitimasi atau *legitimacy theory* telah memberikan pandangan terhadap pengungkapan. Perusahaan dapat menjalankan kegiatannya dengan izin dari masyarakat, maka perusahaan harus dapat menyesuaikan keinginan dari masyarakat. Teori legitimasi memberikan pandangan terhadap pengungkapan informasi sosial baik positif atau negatif. Perusahaan yang terus berusaha untuk memperoleh



legitimasi melalui pengungkapan, berharap pada akhirnya akan tetap *going concern* (Dewi & Pitriyasari, 2019).

Dowling & Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa terdapat 2 dimensi untuk perusahaan agar mendapat dukungan legitimasi, yaitu :

- a. Aktivitas organisasi perusahaan dituntut untuk sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai di tengah masyarakat
- b. Pelaporan atas aktivitas perusahaan harus mencerminkan nilai sosial

Teori legitimasi mengasumsikan bagaimana perusahaan secara terus menerus memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan telah sesuai dengan peraturan dan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat Dowling & Pfeffer (1975). Perusahaan bertentangan dengan norma sosial dalam menjalankan kegiatan usahanya akan berdampak pada menurunnya citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan tersebut sehingga untuk melegitimasi masyarakat perusahaan cenderung menjalankan kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan aspek sosial dan aspek lingkungan.

Jika suatu perusahaan dipandang sebagai perusahaan yang baik, bertindak secara bertanggung jawab atau bahkan secara proaktif dalam kaitannya dengan isu-isu sosial, publik akan memiliki harapan tertentu dalam kaitannya dengan kegiatan sosial dan lingkungan organisasi O'Donovan (2002).

Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat yang dinamakan "*legitimacy gap*". Menurut Wartick & Mahon (1994) dalam Ghozali & Chariri (2007) *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan, yaitu:

- a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah
- b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah



- c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda atau kearah yang sama tetapi waktu nya berbeda

Dalam teori legitimasi, Pengungkapan aktivitas sosial perusahaan diperlukan perusahaan untuk mengatasi *legitimacy gaps*. Pengungkapan aktivitas sosial perusahaan diperlukan perusahaan agar memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga menjamin kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*).

4. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Salah satu teori yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian mengenai tanggung jawab sosial adalah teori sinyal. Pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal. Pengungkapan informasi dari suatu perusahaan dapat memengaruhi naik turunnya harga sekuritas dari perusahaan tersebut. Pengungkapan informasi akuntansi suatu perusahaan dapat memberikan sinyal yang baik (*good news*) dimana perusahaan memiliki prospek yang baik atau sebaliknya perusahaan memberikan sinyal yang buruk (*bad news*) dimasa mendatang (Rokhlinsari, 2016). Asimetri atau ketidaksamaan informasi antara perusahaan dengan pihak luar memberikan dorongan kepada perusahaan untuk mengungkapkan informasi, maka untuk mengurangi ketidaksamaan informasi, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki perusahaan baik keuangan maupun non keuangan (Septiani & Mutmainah, 2013). Teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan bahwa teori ini mengirimkan suatu sinyal dimana pemilik informasi berusaha mengirimkan informasi yang relevan sehingga dapat dimanfaatkan oleh penerima informasi. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan sesuai pemahaman penerima informasi terhadap sinyal yang dikirimkan oleh pemilik informasi. Dengan demikian, untuk membangun reputasi yang lebih baik, suatu perusahaan



memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan sehingga perusahaan dapat menarik para investor (Maulana & Yuyetta, 2014).

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Di Indonesia, ketentuan mengenai *corporate social responsibility* (CSR) diatur dalam **Undang – Undang No. 40 Tahun 2007** tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perseroan atau penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sekarang, tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi hal yang penting untuk mempromosikan pembangunan keberlanjutan perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan dilihat sebagai suatu keharusan agar perusahaan dapat membangun citra yang baik dan terpercaya bagi suatu perusahaan.

6. Pengungkapan

a. Definisi Pengungkapan

Menurut Suwardjono (2014:578) secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu: penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan.

Wolk et al (2001:302) dalam Suwardjono (2014:578) menginterpretasi pengertian pengungkapan sebagai berikut:

“Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the financial statements and supplementary communications including footnotes, post – stataement event, management’s discussion and analysis of operations for the forthcoming year, financial and operating forecasts, and additional financial statements covering segmental disclosure and extensions beyond historical cost.”



Wolk et al memasukkan statemen keuangan segmental dan statemen yang merefleksikan perubahan harga sebagai bagian dari pengungkapan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Tujuan Pengungkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Suwardjono (2014:580) secara umum tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani kepentingan berbagai pihak yang berbeda – beda. Telah disinggung bahwa investor dan kreditor tidak homogen tetalipi bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). Karena Pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

(1) Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan.

(2) Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakaian yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihannya tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir – formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Konsep *Triple Bottom Line*

Salah satu bentuk kesadaran perusahaan mengenai pentingnya kondisi lingkungan adalah praktik tanggung jawab sosial perusahaan. John Elkington melalui bukunya “*Cannibal with forks, the triple bottom line of twentieth century business*” yang dirilis pada tahun 1997 berpendapat bahwa selain berfokus pada keuntungan (*profit*), suatu perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial termasuk kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan kontribusi terhadap lingkungan (*planet*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai *triple bottom line* dari setiap aspek, yaitu :

(1) *Profit* (Keuntungan)

Dari aspek keuangan, perusahaan merupakan organisasi yang berorientasi pada profit (keuntungan). Menurut Schulz (2016) bahwa suatu perusahaan perlu berfokus pada pengukuran produktivitas yang berbeda dan pengembalian aset bagi perusahaan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi pengeluaran biaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *People* (Masyarakat)

Dari aspek sosial (*people*) mengenai komponen sosial menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat dapat diukur melalui Pendidikan dan pelatihan karyawan, akses ke sumber daya sosial, kesehatan dan kesejahteraan karyawan, kinerja sosial bagi pelanggan dan pemasok serta modal sosial Schulz (2016).

(3) *Planet* (Lingkungan)

Dari aspek lingkungan, Wibisono (2007) dalam Linda & Erlene (2012) menjelaskan Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita. hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab-akibat, dimana lingkungan akan memberikan manfaat jika lingkungan di jaga dengan baik. Dengan melestarikan lingkungan maka pelaku industri akan memperoleh keuntungan yang lebih, dan ketersediaan sumber daya lebih terjamin kelangsungannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

7. **Global Reporting Initiative (GRI)**

a. **Pengertian *Global Reporting Initiative* (GRI)**

GRI adalah salah satu organisasi di dunia yang menghasilkan standar pelaporan paling banyak yang digunakan untuk *sustainability reporting* atau pelaporan berkelanjutan. Pedoman ini dibuat agar organisasi pelaporan dapat mengungkapkan dampak yang paling penting, baik dampak positif maupun negatif pada lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Tujuan yang lain adalah organisasi pelapor dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, dan dapat digunakan untuk menilai setiap peluang maupun resiko, dan mengungkapkan lebih banyak informasi guna pengambilan keputusan yang tepat.



b. Indikator Global Reporting Initiative (GRI)

Tabel 2.1

Indikator Global Reporting Initiative

Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI

Kategori : Ekonomi	
Aspek : Kinerja Ekonomi	
201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat perubahan iklim
201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Aspek : Keberadaan Pasar	
202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang tidak signifikan
Aspek : Praktik Pengadaan	
204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
Aspek : Anti Korupsi	
205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi
205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Aspek : Perilaku Anti Persaingan	

© Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



206-1	Langkah - langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti trust dan monopoli
Kategori : Lingkungan	
Aspek : Material	
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat dan volume
301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
Aspek : Energi	
302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
302-2	Konsumsi energi diluar organisasi
302-3	Intensitas energi
302-4	Pengurangan konsumsi energi
302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
Aspek : Air dan Fluen	
303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
303-3	Pengambilan air
303-4	Pembuangan air
303-5	Konsumsi air
Aspek : Keanekaragaman Hayati	
304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Aspek : Emisi	
305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
305-2	Emisi Energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung
305-4	Intensitas Emisi GRK
305-5	Pengurangan emisi GRK
305-6	Emisi zat perusak ozon (OD5)
305-7	Nitrogen oksida (Nox), sulfur oksida (Sox) dan emisi udara yang signifikan lainnya
Aspek : Air Limbah (Efluen) dan Limbah	
306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
306-3	Tumpahan yang signifikan
306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
Aspek : Kepatuhan Lingkungan	
307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang - undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
Aspek : Penilaian Lingkungan Pemasok	
308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Kategori Sosial	
Aspek : Kepegawaian	
401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
401-3	Cuti melahirkan
Aspek : Hubungan Tenaga Kerja / Manajemen	
402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
Aspek : Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
403-3	Layanan kesehatan kerja
403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-9	Kecelakaan kerja
403-10	Penyakit akibat kerja
Aspek : Pelatihan dan Pendidikan	

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
Aspek : Keanekaragaman dan Kesempatan Kerja	
405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
Aspek : Non Diskriminasi	
406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
Aspek : Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	
407-1	Operasi pemasok dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
Aspek : Pekerja Anak	
408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap pekerja anak
Aspek : Kerja Paksa dan Wajib Kerja	
409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
Aspek : Praktik Keamanan	
410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
Aspek : Hak-Hak Masyarakat Adat	
411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
Aspek : Penilaian Hak Asasi Manusia	

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau pelatihan dampak
412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul - klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
Aspek : Masyarakat Lokal	
413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki, dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
Aspek : Penilaian Sosial Pemasok	
414-1	Seleksi Pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Aspek : Kebijakan Publik	
415-1	Kontribusi politik
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
Aspek : Pemasaran dan Pelabelan	
417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dari informasi produk dan jasa
417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Aspek : Privasi Pelanggan	
418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Aspek : Kepatuhan Sosial Ekonomi	
419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

c. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

Sesuai peraturan OJK Nomor 51/POJK.3/2017 tentang Penerapan Keuangan Lanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pasal 1 ayat 13, Laporan Keberlanjutan adalah Laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis. Laporan keberlanjutan merupakan jenis laporan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Laporan ini diungkapkan sebagai pelengkap laporan keuangan (*financial statement*) sehingga laporan ini terpisah dari laporan keuangan perusahaan (Sari, 2013)

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* berbeda dengan laporan keuangan perusahaan pada umumnya karena laporan keberlanjutan atau *sustainability report* diungkapkan sebagai bentuk komitmen suatu perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* sebagai media informasi yang berguna untuk para *stakeholder* internal maupun eksternal agar dapat menilai apakah suatu perusahaan sudah menjalankan tanggung jawabnya. Jadi, laporan keberlanjutan atau *sustainability report* sangat penting untuk para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan maupun suatu perusahaan sebagai pelengkap laporan keuangan (*financial statement*).

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Dalam GRI Standar 2016 menjelaskan bahwa prinsip – prinsip pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan terdiri atas:

(1) Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan cara menanggapi ekspektasi dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan.

(2) Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas

(3) Materialitas

Laporan harus mencakup topik – topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi, signifikan organisasi pelapor atau secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan

(4) Kelengkapan

Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan, dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.

8. Komite Audit

Berdasarkan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 / POJK.04 / 2015**. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pihak dewan komisaris dalam membantu paling sedikit tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, dimana kewenangan untuk



mengangkat dan memberhentikan komite audit berada di tangan dewan komisaris. Komite audit berperan dalam menganalisa bagaimana kinerja manajemen perusahaan.

Menurut Peraturan (Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 7) syarat untuk menjadi komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
- b. Wajib memahami laporan keuangan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen resiko dan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang – undangan terkait lainnya
- c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus, melalui Pendidikan dan pelatihan
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan
- f. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik. Kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen



h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik

i. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Menurut Peraturan (Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 10) dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.

d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawas pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam menjalankan tugasnya komite audit memiliki wewenang berdasarkan Peraturan (Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 11) sebagai berikut :

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya diperlukan
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit
- c. Melibatkan pihak independen diluar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (Jika diperlukan)
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris



9. Leverage

C *Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung kepada kreditur untuk membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi berarti perusahaan tersebut sangat bergantung kepada pinjaman luar untuk membiayai aset perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang lebih rendah berarti perusahaan tersebut lebih banyak membiayai aset perusahaan dengan menggunakan modal sendiri (Purnasiwi, 2011).. Menurut Kasmir, (2018:155) terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur *leverage* sebagai berikut:

a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio utang untuk membandingkan total utang terhadap total aktiva.

Rumus dari DAR adalah sebagai berikut :

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang terhadap ekuitas.

Rumus DER adalah sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Total Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan ekuitas

Rumus LTDtER adalah sebagai berikut :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$



d. Time Interest Earned (TIER)

Time Interest Earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga.

$$\text{TIER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}}$$

e. Fixed Charge Coverage (FCC)

Fixed Charge Coverage (FCC) merupakan rasio yang serupa dengan *times earned ratio*, tetapi rasio ini hanya dilakukan apabila perusahaan memiliki utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa.

$$\text{FCC} = \frac{\text{EBIT} + \text{Interest} + \text{Lease}}{\text{Interest} + \text{Lease}}$$

10. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kegiatan bisnisnya. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa kepada pelanggannya (*customer*). Tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah memperoleh profit secara maksimal baik profit jangka panjang maupun profit jangka pendek.

Menurut Kasmir (2018:198) pengukuran profitabilitas dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

(1) Profit Margin

Profit Margin on sales atau *ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan bersih.

Rumus *Profit Margin* adalah sebagai berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Sales}}$$



(2) *Return On Total Assets (ROA) / Return On Investment (ROI)*

Return on assets (ROA) atau *Return on investment (ROI)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Rumus *Return On Assets (ROA)* atau *Return On Investment (ROI)* adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

(3) *Return On Common Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Rumus *Return On Equity (ROE)* adalah sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

(4) *Laba per Lembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock)*

Rasio laba per lembar saham atau rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.

Rumus Laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut :

$$\text{Laba per lembar saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

11. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan lama perusahaan berdiri. Umur perusahaan dapat diukur dengan menghitung sejak perusahaan berdiri sampai dengan perusahaan menjadi sampel penelitian. Perusahaan yang sudah lama berdiri diyakini lebih dipercaya oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

masyarakat dari segi peningkatan laba dan citra baik perusahaan yang telah ditunjukkan perusahaan sejak perusahaan itu berdiri. Dalam teori legitimasi bahwa sistem sosial dan sistem perusahaan sama sehingga tidak mengancam teori legitimasi. Perusahaan yang sudah lama berdiri dan mengungkapkan CSR maka akan lebih mengetahui kondisi lingkungan di masyarakat dibandingkan perusahaan yang belum lama berdiri (Oktariani dalam Vivian, 2020).

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Esti Rofiqkoh dan Maswar Patuh Priyadi

Judul	PENGARUH PROFITABILITAS, <i>LEVERAGE</i> , DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Variabel Penelitian	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran perusahaan
Objek Penelitian	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2012-2014
Model Penelitian	$CSRI = \alpha + \beta_1 \text{PROFIT} + \beta_2 \text{LEV} + \beta_3 \text{SIZE} + e$
Kesimpulan	Profitabilitas memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, <i>Leverage</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> .

2. Penelitian Vivian, Yessica, Florencia, Winnie, Devi, Namira

Judul	PENGARUH PROFITABILITAS, <i>LEVERAGE</i> , UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Variabel Penelitian	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris.
Objek Penelitian	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2014-2018
Model Penelitian	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$
Kesimpulan	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR. Ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap CSR.





3. Penelitian Devi Widya Astuti

Judul	PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Variabel Penelitian	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan
Objek Penelitian	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2013-2018
Model Penelitian	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$
Kesimpulan	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Penelitian Riri dan Mohamad

Judul	PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP CSR DISCLOSURE PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN DI BEI
Variabel Penelitian	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Pemerintah, Profitabilitas
Objek Penelitian	Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2015-2018
Model Penelitian	$CSRI = \alpha + \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{Age} + \beta_3 \text{GovOwn} + \beta_4 \text{Prof} + e$
Kesimpulan	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>CSR Disclosure</i> , Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>CSR Disclosure</i> , Kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap <i>CSR Disclosure</i> , Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap <i>CSR Disclosure</i> .

5. Penelitian Novita Anggraeni

Judul	<i>GENDER</i> , KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN DEWAN, KOMITE AUDIT DAN PENGUNGKAPAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i>
Variabel Penelitian	<i>Gender</i> , Komisaris Independen, Ukuran Dewan, dan Komite Audit
Objek Penelitian	Perusahaan yang tercatat di database <i>Global Reporting Index</i> dan tercatat di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2013-2018
Model Penelitian	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kesimpulan	Ukuran dewan dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, <i>Gender</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tugas komite audit adalah mengawasi kinerja manajemen perusahaan serta memberikan arahan. monitoring yang baik, maka diharapkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas, karena adanya kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi yang dapat diminimalisir. Adanya komite audit dalam suatu perusahaan mampu mendorong perusahaan dalam melakukan pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari tata kelola perusahaan. Transparansi suatu perusahaan merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang menjadi fokus bagi komite audit (Aniktia & Khafid., 2015). Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota komite audit suatu perusahaan maka proses pengawasan akan berjalan dengan baik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat oleh perusahaan akan semakin luas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Kadek & Sulestiana, 2021) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan yang dengan tingkat *leverage* yang tinggi berarti perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap utang dari pihak luar untuk membiayai aset perusahaan, sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah berarti perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih banyak membiayai aset perusahaan dengan modal sendiri. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* adalah *Debt Equity Ratio* (DER). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah akan lebih luas melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan daripada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi karena perusahaan harus mengurangi biaya – biaya untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari pada *debtholders* Astuti (2019). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin rendah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sebaliknya sehingga dapat dikatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kegiatan bisnisnya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan tanggung jawab sosial (Sumedi, 2010). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan adalah rasio *Return On Asset* (ROA). Kemampuan Manajemen aset dapat dilihat dari *Return On Asset* (ROA) yang tinggi karena dengan ROA yang tinggi berarti suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Amalia (2013) Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, identik dengan upaya – upaya untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Sedangkan perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi maka akan meningkatkan nilai perusahaan dalam proses pembentukan *image* yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dilakukan oleh (Astuti, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Salah satu variabel yang digunakan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) adalah umur perusahaan (*company age*). Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan berdiri (Safar & Widyaningsih, 2021). Berdasarkan teori legitimasi (*legitimacy theory*) perusahaan yang lebih lama berdiri cenderung mempertahankan eksistensinya dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu bersaing dibandingkan perusahaan yang belum lama berdiri karena perusahaan yang lebih lama berdiri memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pengungkapan informasi untuk menarik perhatian para investor daripada perusahaan yang lebih muda sehingga informasi yang diungkapkan juga lebih luas. Hal ini sesuai dengan penelitian Vivian et al., (2020) yang menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

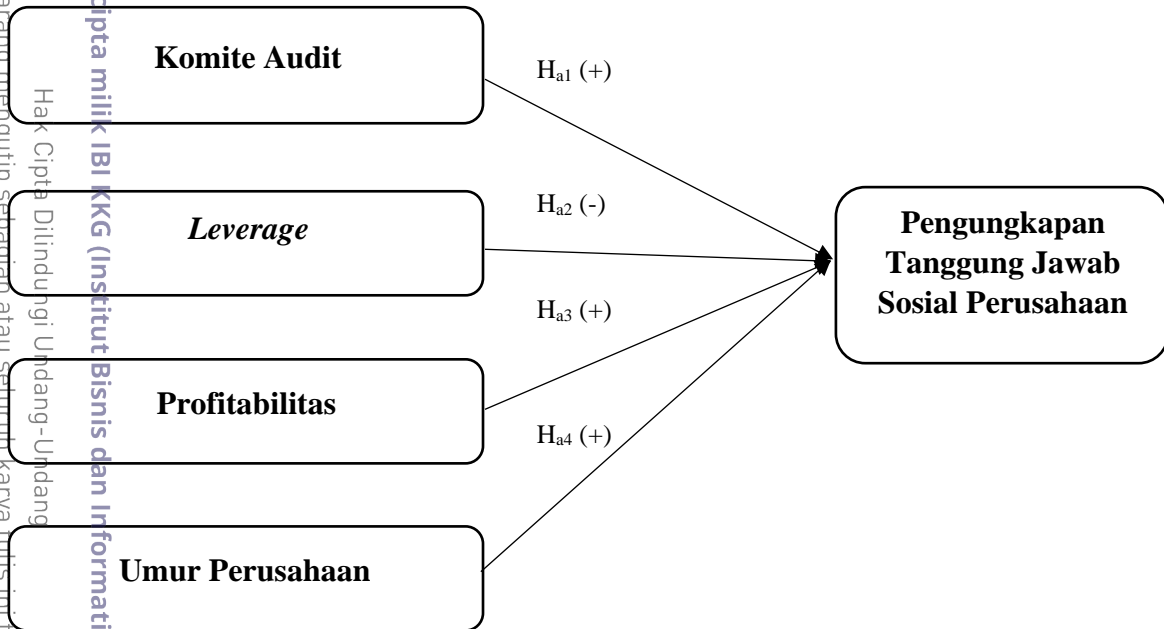
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H_{a1} : Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan
- H_{a2} : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan
- H_{a3} : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan
- H_{a4} : Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan.